

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup juga terdiri dari komponen yang sangat kompleks, dan pengelolaan semua komponen ini harus dijamin oleh negara. berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Konsep ini mengandung makna bahwa salah satu aspek lingkungan hidup yang menjadi perhatian penting adalah bumi dan air serta kekayaan alam sekitar. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang mempunyai dampak besar terhadap aktivitas manusia adalah permasalahan air yaitu permasalahan Daerah Aliran Sungai (DAS).<sup>2</sup> DAS merupakan bagian dari bumi yang mengandung air dan mengandung kekayaan alam sehingga harus dilindungi, diatur, dikuasai dan dikelola oleh negara dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya,

---

<sup>1</sup> Lihat pada pasal 1 ayat 1 undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup

<sup>2</sup> Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (Open Data PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 16 Desember 2020. Tentang Wilayah Sungai. Diakses pada 8 November 2022 dari <https://data.pu.go.id/dataset/wilayah-sungai>)

agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu kewenangan dalam pengelolaan DAS sudah diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.<sup>3</sup> Pengelolaan DAS pada dasarnya belum berjalan dengan baik, banyak faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan DAS tidak berjalan dengan baik, salah satu permasalahan DAS yang menyebabkan dampak besar terhadap masyarakat adalah erosi pada DAS.

Erosi merupakan proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di tempat yang lain.<sup>4</sup> Erosi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu iklim, struktur dan jenis tanah, vegetasi, topografi dan faktor pengelolaan tanah. Erosi terbagi atas dua jenis yaitu erosi air dan erosi angin, erosi angin yaitu erosi yang biasanya terjadi pada daerah padang pasir adanya pengikisan batu dan pasir oleh angin, sedangkan erosi air merupakan agen erosi yang paling penting dan sering mengikis DAS. Tetapi jika dilihat

---

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung

<sup>4</sup> Rindang Mekarsasi dan Puji Utomo. "Analisis Tingkat Bahaya Erosi Pada Waduk Wadaslintang Dengan Aplikasi Arcgis;jurnal geografi".Jurnal Geografi Gea. Vol, 19 Nomor 2. Oktober (2019). Hlm 2. (suripin, 2002).

secara ilmiah air pada dasarnya menciptakan bentuk pengikisan terhadap benda yang dihadapinya. Pada tulisan ini penulis melihat peristiwa erosi yang disebabkan oleh air pada sungai yang membuat daerah aliran sungai terkikis sampai dirobohkan oleh air.

Kasus Erosi daerah aliran sungai sebenarnya di Indonesia sudah banyak terjadi di beberapa daerah seperti contoh kasus erosi pada sungai di Pidie Aceh pada tahun 2019 lalu yang mengancam jalan terputus akibat erosi yang terjadi.<sup>5</sup> Selain itu pada November 2021 kemarin juga terjadi adanya kasus erosi sungai Grindulu di Pacitan dan mengakibatkan puluhan rumah warga terancam amblas.<sup>6</sup> Kasus serupa juga terjadi di Sumatera Barat yaitu pada Daerah Aliran Sungai Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Sungai Batang Anai merupakan salah satu sungai terpanjang di Kabupaten Padang Pariaman dengan panjang 46 km, Sungai Batang Anai dalam beberapa tahun terakhir sudah mengalami beberapa kali erosi di beberapa tempat yaitu di Talao Mundam Nagari Ketaping yang mengakibatkan sejumlah rumah warga dan badan jalan juga ambruk, sebagaimana diberitakan dalam TVRI News Padang Pariaman pada Rabu (6/7/2022),<sup>7</sup> selain itu pemberitaan yang sama juga terjadi pada kasus erosi sungai Batang Anai di Kapalo Banda Nagari Sungai Buluh Timur, yang terjadi pada jumat (24/6) dimana terjadi longsor pada badan jalan di Kapalo Banda karena hantaman air sungai

---

<sup>5</sup> Serambinews.com. 2019. Erosi Sungai Kembang Tanjong Kian Mengkhawatirkan, 200 ,Meter Tanah Sepanjang DAS Amblas (*online*). (<https://aceh.tribunnews.com/2019/08/22/erosi-sungai-kembang-tanjong-kian-mengkhawatirkan-200-meter-tanah-sepanjang-das-amblas> diakses pada 31 Oktober 2022)

<sup>6</sup> Tvonenews.com. 2021. Erosi Sungai Grindulu Di Pacitan, Rumah Warga di Dua Desa Terancam Amblas (*online*). (<https://aceh.tribunnews.com/2019/08/22/erosi-sungai-kembang-tanjong-kian-mengkhawatirkan-200-meter-tanah-sepanjang-das-amblas> diakses pada 31 Oktober 2022)

<sup>7</sup> Abdul, " Korban Erosi Batang Anai Minta Penanganan Dipercepat" (TVRINEWS.COM, 6 Juni, 2022),

karena debit air sungai yang tinggi akibat diguyur hujan, dan akibatnya akses masyarakat terputus.<sup>8</sup> Begitu juga yang terjadi pada daerah korong palapa saiyo II Nagari Sungai Buluh Selatan pada Minggu (26/12/21) kondisi daerah aliran sungai sudah terkikis oleh air dan mengancam beberapa rumah warga di dekat aliran sungai ambruk, serta satu rumah warga sudah roboh oleh erosi. Melihat dari peristiwa tersebut, permasalahan erosi sungai di Batang Anai belum ada penanganan yang serius dari pihak yang berwenang, disamping itu ancaman yang ditimbulkan sudah bisa dikatakan membahayakan bagi masyarakat.

Permasalahan erosi pada dasarnya akibat dari aspek geografis dan iklim serta tanah pada aliran sungai, namun tujuan penulisan ini penulis melihat bahwa erosi sungai yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor alam saja, tetapi adanya persoalan penanganan dan pengelolaan sungai tersebut oleh aktor politik dalam mengambil kebijakan dan adanya perbedaan pandangan terkait dengan peran mereka sebagai pemimpin kebijakan dalam menangani fenomena tersebut, hal inilah yang menjadi akar permasalahan erosi pada sungai, dalam etika lingkungan kita juga mengenal dengan istilah Antroposentrisme yaitu pemikiran yang fokus kepada keuntungan yang diperoleh oleh manusia.<sup>9</sup> Manusia disini jika dikaitkan dengan permasalahan erosi sungai merupakan sebagai aktor yang terlibat dalam penanganan erosi sungai sebagai pemangku kepentingan, filosofi yang diadopsi oleh antroposentris adalah manusia memiliki peran yang istimewa, namun dalam implementasinya manusia sebagai aktor seringkali sifat istimewa tersebut berbenturan dengan perspektif ekosentris, yang melihat fokus kepada

---

<sup>8</sup> Aji, " Batang Anai Mengamuk Jalan Putus Total" (MinangkabauNews, 24 Juni, 2022)

<sup>9</sup> Verdinand Robertua Siahaan. *Politik Lingkungan Indonesia*. (Jakarta:UKI Press,2020), 8

keutuhan dan keberlanjutan bumi.<sup>10</sup> Dengan melihat etika manusia dalam perspektif antroposentris Permasalahan erosi sungai bukan hanya berbicara tentang faktor alam tetapi adanya peran penting sumber daya manusia yang mengelolanya, termasuk didalamnya aktor politik.

Berbicara aktor, banyak para ahli mendefinisikan aktor sebagai berikut, Hardiansyah menyatakan aktor adalah orang atau seseorang yang memiliki suatu kepentingan tertentu, selain itu Falah menyatakan bahwa aktor adalah pihak tertentu yang mampu mengakomodir sesuatu dengan kuasa yang dimilikinya untuk mencapai kepentingan tertentu.<sup>11</sup> Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa aktor merupakan pihak yang terlibat dalam sesuatu hal yang mempunyai kepentingan di dalamnya, aktor yang terlibat cenderung dikaitkan dengan sebuah kepentingan, terpenuhi kepentingan aktor merupakan bagian terpenting dari sebuah peran aktor.

Sejalan dengan isu permasalahan erosi sungai, peran pemangku kepentingan di dalamnya sangat mendominasi, pemikiran antroposentris menjadi hal yang diutamakan terlihat dalam penanganan lingkungan, begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai pasal 4, menyatakan bahwa pengelolaan sungai dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dengan kewenangannya.<sup>12</sup> maka dari itu peran pemerintah sebagai aktor diberikan ruang dengan *stakeholders* untuk terlibat

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Dwi Wulandari Lukman "Identifikasi Aktor Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Kawasan Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan Dan Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba".Skripsi. 2017. 4

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011. Sungai



dalam penanganan permasalahan erosi sungai. Selain itu fakta di lapangan juga menyebutkan bahwa permasalahan yang muncul tersebut karena lemahnya penanganan yang dilakukan oleh pejabat publik karena tidak adanya kebijakan dari mereka yang mempunyai tanggung jawab atas pemeliharaan sungai termasuk daerah aliran sungai, bahkan setelah ada beberapa kasus erosi yang terjadi, bukan penanganan yang dilakukan, akan tetapi tampak dari beberapa aktor politik dan pejabat publik yang lepas tangan, hal tersebut terlihat dari upaya yang mereka lakukan saat erosi terjadi pada 26 Desember 2021 ada upaya masyarakat yang dilakukan dengan memasang bambu di sepanjang DAS Batang Anai sembari mereka juga menunggu kedatangan dari Bupati Padang Pariaman yang berjanji akan meninjau langsung DAS namun pada akhirnya tidak datang ke lokasi.<sup>13</sup>

Dari penelusuran penulis, setidaknya terdapat lima penelitian terkait dengan persoalan erosi, pertama penelitian yang dilakukan oleh Juju Junengsih, Eka Intan Kumala Putri, Ahyar Ismail.<sup>14</sup> Kedua, penelitian oleh N.A.Dwi Putri.<sup>15</sup> Ketiga, penelitian oleh M Ruslin Anwar, Pudyono, dan Sahiruddin M.<sup>16</sup> Keempat, penelitian yang ditulis oleh Achmad Nur Fauzi, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> BanuaMinang.co.id. 2021. Masyarakat Palapa Kecewa Menantikan Bupati Sampai Jam 5 Sore (online). 26 Desember 2021. (<https://banuaminang.co.id/masyarakat-palapa-kecewa-menantikan-bupati-sampai-jam-5-sore/?share=facebook&nb=1> diakses pada 27 september 2022).

<sup>14</sup> Juju Junengsih, Eka Intan Kumala Putri dan Ahyar Ismail." Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan DAS Citarum dan Limbah Industri". jurnal politik Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 4 No. 2, Agustus 2017: 112-124

<sup>15</sup> N.A.Dwi Putri." Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Siak ( Studi pada Daerah Aliran Sungai Siak Bagian Hilir )". Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No. 1, 2011

<sup>16</sup> M Ruslin Anwar, Pudyono, dan Sahiruddin." Penanggulangan Erosi Secara Struktural Pada Daerah Aliran Sungai Bango". Jurnal Rekayasa Sipil. Volume 3, No.1 – 2009

<sup>17</sup> Achmad Nur Fauzi, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si." Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang *Smart City*". Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Rindang Mekarsasi dan Puji Utomo.<sup>18</sup> Dari kajian literatur diatas hanya berfokus pada kebijakan dan program dalam penanganan erosi sungai, sementara pada penelitian ini berfokus pada analisis pemetaan pemangku kepentingan dalam penanganan erosi daerah aliran Sungai Batang Anai yang nantinya akan dikaji dalam konsep *stakeholder mapping*, inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

## 1.2 Rumusan masalah

Melihat fakta yang ditemui berdasarkan latar belakang diatas, bahwa banyak sekali peristiwa erosi yang terjadi pada daerah aliran sungai di Indonesia, begitu juga yang terjadi pada Sungai Batang Anai, yaitu adanya degradasi atau erosi yang terjadi pada DAS Sungai Batang Anai yang tidak hanya terjadi pada satu titik saja, melainkan terjadi di beberapa titik di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 1.1 Peta Sungai Batang Anai

Sungai Batang Anai merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Padang Pariaman termasuk juga bagian dari salah satu sungai terpanjang di Sumatera Barat. Daerah aliran Sungai Batang Anai mempunyai luas 712,45 km<sup>2</sup>

<sup>18</sup> Rindang Mekarsasi dan Puji Utomo, *loc.it*.

dengan 24 sub-sub daerah aliran sungai. DAS Batang Anai melintasi beberapa Kabupaten atau Kota yaitu: Bagian Hulu berada di Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan X Koto dan Kota Padang Panjang di Kecamatan Padang Panjang Barat; di bagian tengah berada di Kabupaten Padang Pariaman di Kecamatan. 2 x 11 Kayu Tanam; di Bagian Hilir berada di kabupaten Padang Pariaman di Kecamatan Lubuk Alung & Kecamatan Batang Anai serta di Kota Padang di Kecamatan Koto Tangah. Batang Anai panjangnya + 69,32 km dimulai dari hulunya yang berada di Puncak Gunung Merapi dengan ketinggian 2.751 m DPL hingga muara.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal diatas dapat kita lihat bahwa posisi Sungai Batang Anai menjadi sentral dalam kegiatan masyarakat yang menimbulkan dampak kepada masyarakat secara langsung. Setidaknya terdapat tiga peristiwa yang sebelumnya terjadi erosi pada daerah aliran sungai batang anai yang berada pada nagari lain yang masih dialiri oleh sungai batang anai, yaitu pertama terjadi di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tepatnya pada Korong Talao Mundam pada 6 Juli 2022 dimana erosi juga memakan badan jalan yang dilalui setiap hari oleh masyarakat Nagari Katapiang, dan mengancam beberapa rumah yang berada di dekat sungai, namun penanganan erosi ini sampai

---

<sup>19</sup> Syafril Daus. "Analisis Degradasi Dasar Sungai Batang Anai Dan Pengaruhnya Terhadap Kestabilan Bendung Anai di Sumatera Barat". Makalah



saat ini juga belum ada terlihat dari pihak berwenang untuk memperbaiki daerah aliran sungai Batang Anai.<sup>20</sup>



Gambar 1.2 Kondisi DAS Batang Anai di Korong Talao Mundam

**Sumber :** Data sekunder dikelola oleh peneliti dari Berita Online *TVRINews.com* pada Selasa 27/09/2022 pukul 4.07 Pm

Selanjutnya peristiwa kedua, hal serupa juga terjadi di Nagari Sungai Buluh Timur, sebulan pasca peristiwa yang terjadi di Talao Mundam juga terjadi di Kapalo Banda,<sup>21</sup> erosi terjadi pada 24 Juni 2022 karena hujan lebat yang mengguyur daerah batang anai dan menyebabkan badan jalan pada daerah aliran sungai longsor putus.

<sup>20</sup> TVRINews.com. 2022. Korban Erosi Batang Anai Minta Penanganan Dipercepat (*online*). 6 Juli 2022. ( <https://www.tvrinews.com/id/berita/tdy6pei-korban-erosi-batang-anai-minta-penanganan-dipercepat> diakses pada 15 september 2022).

<sup>21</sup> MinangkabauNews.com. 2022. Batang Anai Mengamuk, Jalan Putus Total (*online*).24 Juni 2022. (<https://minangkabaunews.com/batang-anai-mengamuk-jalan-putus-total/?amp> diakses pada 27 september 2022).



Gambar 1.3 Kondisi DAS Batang Anai di Sungai Buluh Timur

**Sumber** : Data sekunder dikelola oleh peneliti dari Berita Online *MinangkabauNews* pada Selasa 27/09/2022 pukul 4.07 Pm

Peristiwa ketiga erosi yang terjadi di Korong Palapa Saiyo II Nagari Sungai Buluh Selatan pada Minggu 26 Desember 2021 kondisi daerah aliran sungai yang sudah terkikis oleh air dan mengancam beberapa rumah warga di dekat aliran sungai ambruk,<sup>22</sup> serta satu rumah warga sudah roboh oleh erosi, dan pada 18 April 2022 pada daerah yang sama namun di lokasi yang berbeda juga kembali terjadi erosi yang membuat badan jalan di Korong Palapa Saiyo II akibat penanganan erosi yang sudah terjadi pada setahun yang lalu tidak ditangani secara serius oleh pihak yang berwenang.

---

<sup>22</sup> BanuaMinang.com. *loc.cit.*



Gambar 1.4 Kondisi DAS Batang Anai Nagari Sungai Buluh Selatan

**Sumber :** Data Primer



Gambar 1.5 Upaya masyarakat mengatasi erosi di Sungai Buluh Selatan

**Sumber :** Data Primer



Gambar 1.6 Kondisi DAS Batang Anai di Sungai Buluh Selatan

**Sumber :** Data Primer

Berdasarkan fakta tersebut dapat kita lihat sudah terjadi erosi di tiga tempat yang dilalui oleh daerah aliran sungai Batang Anai, dan penanganan yang



dilakukan oleh pemangku kepentingan yang dalam hal ini aktor yang terlibat seperti pemerintah tidak ada, tetapi penanganan sementara terlihat dari masyarakat, saat erosi terjadi pada 26 Desember 2021, ada upaya melakukan pemasangan bambu di sepanjang DAS Batang Anai sembari mereka juga menunggu kedatangan dari Bupati Padang Pariaman yang berjanji akan meninjau langsung DAS namun pada akhirnya tidak datang ke lokasi.<sup>23</sup> Thomson dalam Kadir mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*).<sup>24</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti berasumsi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kekuatan yang kuat dalam penanganan kasus ini, namun memiliki kepentingan yang rendah, sedangkan masyarakat mempunyai kepentingan kuat, tetapi tidak memiliki kekuatan besar dalam penanganannya. Selain itu didalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 pasal 4 tentang Sungai mengatakan bahwa pengelolaan sungai dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dengan kewenangannya, dan untuk Sungai Batang Anai sendiri merupakan sungai yang berada dalam kawasan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola termasuk dalam penanganan kasus erosi ini. Namun, seperti yang dilihat masalah yang muncul erosi sungai batang anai tidak kunjung ada penanganan dari aktor yang berwenang, hal ini terlihat adanya ketidakjelasan

---

<sup>23</sup> BanuaMinang.com. *loc.cit.*

<sup>24</sup> Rizky fajar wibowo, & Dewi Rostyaningsih. 2016. Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati). Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016.

tugas dan wewenang dari aktor yang berhak dan mempunyai kewajiban dalam penanganan kasus ini. Dengan fenomena tersebut peneliti melahirkan permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu : Bagaimana pemangku kepentingan dalam penanganan kasus erosi daerah aliran Sungai Batang Anai di Kecamatan Batang Anai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Seperti telah dipaparkan di dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah : untuk menjelaskan dan menganalisis pemetaan pemangku kepentingan dalam penanganan kasus erosi Sungai Batang Anai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Akademis**

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian *stakeholder mapping*, serta bisa menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami kajian pemetaan pemangku kepentingan terhadap sebuah permasalahan publik dalam bentuk kebijakan publik.

#### **2. Secara Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan baru bagi mahasiswa tentang bagaimana pemetaan pemangku kepentingan dalam penanganan dan pembuatan suatu kebijakan.